

Sosialisasi Hak dan Peran Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan Kesadaran Berpendidikan Masyarakat Pesisir Laut

Dody Bakhtiar Al-Anshori, Sayidatul Maslahah, Yuni Tanjung Utami, Rizki Aningrum, Irmawanti

Universitas Sultan Ageng Titayasa

Artikel Info

Genesis Artikel:

Dikirim, 11 September 2025
Diterima, 8 Desember 2025
Diterbitkan, 2 Januari 2026

Kata Kunci:

Sosialisasi
Disabilitas
Hak Berpendidikan

ABSTRAK

Latar Belakang: Masalah utama yang dihadapi di masyarakat pesisir Desa Domas adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan bagi disabilitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir tentang hak dan peran penyandang disabilitas dalam pendidikan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kolaborasi antara tim pengabdian, masyarakat, dan penyandang disabilitas. Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang hak-hak pendidikan penyandang disabilitas. Program ini juga berhasil menggeser stigma sosial dan mengubah perilaku orang tua penyandang disabilitas menjadi lebih proaktif dalam mendukung pendidikan anak mereka. **Kesimpulan:** Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan diri. Namun keberlanjutan pendidikan inklusif memerlukan dukungan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak.

ABSTRACT

Keywords:

Socialization
People with Disabilities
The Right to Education

Background: The main issue faced by the coastal community of Domas Village is the low level of public awareness regarding education for persons with disabilities. **Objective:** This study aims to enhance the awareness and understanding of coastal communities about the rights and roles of persons with disabilities in education. **Method:** The study employs the Participatory Action Research (PAR) method with a qualitative approach. This method involves collaboration among the research team, the community, and persons with disabilities. The research stages include planning, implementation, and evaluation, all of which are systematically designed. **Results:** The findings indicate a significant improvement in the community's understanding of the educational rights of persons with disabilities. The program also succeeded in reducing social stigma and transforming the behavior of parents of children with disabilities to become more proactive in supporting their children's education. **Conclusion:** The program effectively fostered awareness and self-confidence. However, the sustainability of inclusive education requires more comprehensive support from various stakeholders.

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Dody Bakhtiar Al-Anshori,
Universitas Sultan Ageng Titayasa,
Email: dody.bakhtiar@untirta.ac.id

1 PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara dan masyarakat yang berlandaskan peraturan undang-undang, termasuk penyandang disabilitas didalamnya. Cakupan hak tidak hanya mendapatkan perlakuan yang setara namun dapat juga berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara tegas menyatakan untuk mengakui dan melindungi hak-hak disabilitas, hak untuk hidup, hak bersuara, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan dalam penerapan hak-hak ini terutama pada bidang pendidikan, masih jauh dari harapan terutama bagi masyarakat pesisir laut yang seringkali terisolasi dari akses informasi teknologi dan fasilitas yang memadai (Swadesi et al., 2021).

Penyandang disabilitas memiliki peran yang sama dengan semua orang diantaranya sebagai agen perubahan dalam pembangunan negara dan bangsa. Mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sebuah aktualisasi yang nyata dalam perubahan signifikan. Namun, pandangan diskriminatif yang menganggap disabilitas sebagai aib masih seringkali terjadi yang menghambat partisipasi dan kontribusi penyandang disabilitas dalam masyarakat, terutama di daerah pesisir yang cenderung kurangnya pengetahuan tentang isu ini (Munauwarah et al., 2021). Untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan, pelatihan dan pekerjaan merupakan langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Melalui pendidikan salah satu pemenuhan hak bisa dicapai. Pendidikan merupakan hak yang mendasar bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas didalamnya, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan deklarasi hak asasi manusia internasional (Abdussamad et al., 2022).

Sosialisasi tentang hak dan peran disabilitas dalam pendidikan bertujuan untuk mengubah perspektif masyarakat untuk menjadi pengakuan atas derajat manusia yang setara, sehingga membuka jalan bagi penyandang disabilitas dapat melakukan peran yang konstruktif pada masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat pada hak dan peran penyandang disabilitas merupakan hal penting dalam membangun masyarakat yang inklusif. Di wilayah pesisir, tantangan yang dihadapi sering kali lebih banyak dibandingkan wilayah kota. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, sehingga dapat mempengaruhi perspektif mereka dalam memandang penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pendekatan sosialisasi yang khusus dan berkelanjutan untuk peningkatan pemahaman serta penerimaan masyarakat pesisir terhadap hak-hak dan kemampuan penyandang disabilitas (Lestari & Raodah, 2020).

Adapun beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan disabilitas sebagai subjek utama penerima program pengabdian. Program pengabdian yang dilakukan oleh Aulia & Noor (2025) berjudul 'sosialisasi edukasi hak disabilitas melalui mini proyek ramah difabel'. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk mewujudkan lingkungan

yang inklusif dan ramah disabilitas. Tujuan yang akan dicapai tim pengabdian dari terselenggaranya program ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga Desa terhadap hak-hak disabilitas. Program pengabdian lainnya dilakukan oleh Novyana et, al., (2024) dengan judul pemberdayaan penyandang disabilitas di SLB 02 Jakarta mengenai sosialisasi hak dan kewajiban pendidikan inklusif. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kompleks mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pendidikan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa peserta penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar merasa lebih terinformasi tentang hak-hak mereka dalam pendidikan inklusif, dan peserta merasa lebih percaya diri dalam mengakses layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Program pengabdian serupa lainnya dalam aspek hukum normatif, secara eksplisit bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar dan memperoleh pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip Hak Asasi Manusia (Faiq, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak disabilitas justru kurang diperhatikan dan pemerintah kurang mendukung terhadap layanan akses pendidikan bagi disabilitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Permasalahan utama yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih mandiri bagi penyandang disabilitas. Perspektif ini bersumber pada stigma, dimana penyandang disabilitas dianggap belum mampu bersaing dalam hal pekerjaan. Terlebih lagi sarana akses terhadap fasilitas pendidikan inklusif masih belum adaptif bagi semua individu penyandang disabilitas, serta minimnya dukungan sosial dan lowongan pekerjaan yang cukup untuk memfasilitasi partisipasi mereka ke dalam dunia kerja (Astuti & Sudrajat, 2020). Dari hal ini mengakibatkan kurangnya motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka akan berdampak pada lambatnya kemajuan sosial secara komprehensif. Beberapa orang tua juga masih merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat, akibatnya banyak anak dengan disabilitas kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

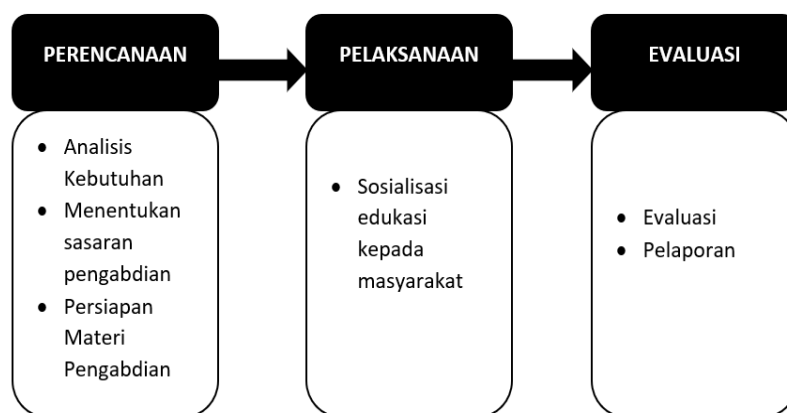
Pada sisi lainnya, beberapa institusi pendidikan formal menghadapi tantangan yang sumber daya manusia. Beberapa sekolah menolak penerimaan anak berkebutuhan khusus karena keterbatasan sumber daya dan tidak adanya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan khusus. Ketiadaan guru yang terlatih dalam mendidik anak dengan disabilitas netra, rungu, fisik motorik dan intelektual menjadi hambatan besar untuk terselenggaranya pendidikan inklusi. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berfokus pada sosialisasi hak dan peran penyandang disabilitas.

Tujuan program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir tentang hak dan peran penyandang disabilitas dalam pendidikan. Sosialisasi yang

dilakukan bukan hanya penyampaian ilmu pengetahuan saja, melainkan sebuah proses mengubah perspektif dan paradigma masyarakat mengenai stigma disabilitas. Harapan program ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan hak berpendidikan bagi setiap warga negara. Program pengabdian dilakukan bertempat di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Provinsi Banten.

2 METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan participatory action research (PAR) yang difokuskan kepada kolaborasi antara tim pengabdi, masyarakat dan penyandang disabilitas. Metode kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan, sementara Participatory Action Research secara spesifik melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang relevan, khususnya terkait dengan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas (Widhyharto, 2018). Langkah-langkah pelaksanaannya dirancang secara sistematis dalam tiga fase utama (Gambar 1). Fase langkah tersebut menurut (Jayanti & Marlina, 2018) dalam Sugiyono, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang pada setiap fasenya mengintegrasikan kolaborasi aktif dari masyarakat.



Gambar 1. Tahapan pengabdian masyarakat

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap pertama, perencanaan dilakukan selama 8 hari sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Lokasi penelitian bertempat di desa Domas kecamatan Pontang kabupaten Serang. Peneliti dan tim melakukan wawancara dan pemetaan sosial di masyarakat pesisir untuk mengetahui total penyandang disabilitas, hambatan yang di alami, kemampuan yang dimiliki, kebutuhan serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pendidikan. Data yang dikumpulkan kemudian dijadikan dasar dalam merancang materi sosialisasi secara mendalam dan relevan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Peneliti menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kepala desa, RT, RW,

ketua pemuda, kyai dan lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan serta saran bagi perubahan desa. Disamping itu, tim mempersiapkan narasumber yang sesuai dengan bidangnya yaitu Dody Bakhtiar Al-Anshori, M.Pd. Beliau merupakan dosen pendidikan khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Tahap Pelaksanaan Program Sosialisasi.

Tahap kedua, Setelah persiapan cukup maka kegiatan utama akan dilaksanakan, dimulai dengan seminar edukasi interaktif yang dilakukan pada hari minggu 03 Agustus 2025 berlokasi di Kantor Desa Domas. Seminar dihadiri oleh 20 orang yang merupakan tokoh dan penggerak masyarakat. Metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan diskusi berbagi pengalaman agar tidak terkesan menggurui, prinsip ini mengacu pada pendekatan andragogi. Seminar ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hak dan peran penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang akan dihadiri oleh masyarakat, penyandang disabilitas dan guru setempat. Di hari selanjutnya, peneliti dan tim akan melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk memberikan tata cara pembelajaran individual sesuai tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dan konseling keluarga serta memberikan motivasi agar keluarga terdorong dalam mendidik anak dirumah.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan.

Tahap ketiga, Peneliti dan tim akan melakukan evaluasi dampak kegiatan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mengetahui pergeseran stigma sosial dan perubahan paradigma, motivasi dan perubahan perilaku orang tua, sikap guru dalam mendukung pendidikan inklusi. Selain itu, peneliti dan tim mengumpulkan masukan berupa saran dan kritik. Seluruh temuan, hasil, dan program ini akan didokumentasikan dalam sebuah laporan ilmiah sebagai luaran utama dari kegiatan pengabdian ini. Metode ini diharapkan dapat menciptakan model pemberdayaan masyarakat yang dapat dicontoh bagi masyarakat lainnya terutama di wilayah pesisir untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

3 HASIL DAN ANALISIS

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, seminar edukasi interaktif menjadi hal inti dari program pengabdian. Pertama dimulai dengan pembukaan yang mencakup sambutan dari kepala desa dan perwakilan tim pengabdian. Selanjutnya, penyampaian materi secara lengkap dan mudah dipahami yang dilakukan oleh narasumber ahli di bidang pendidikan khusus. Materi berfokus pada penjelasan hak-hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta pentingnya pembelajaran berbasis lingkungan alam dalam aspek perkembangan penyandang disabilitas, seperti menangkap ikan yang tujuannya untuk mengasah motorik. Materi ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Jayanti & Marlina (2018), bahwa materi membahas berbagai bentuk pendidikan

yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk pendidikan inklusif, integratif, segregatif dan layanan pendidikan khusus yang semuanya diatur dalam peraturan daerah dan menteri. Kemudian narasumber memberikan contoh-contoh kasus nyata dan kisah inspiratif agar sebagai bukti bahwa disabilitas mampu berkembang secara optimal.



Gambar 2. Penyampaian Materi dari Narasumber

Setelah penyampaian materi pada Gambar 2, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dibuka. Sesi diskusi interaktif diadakan untuk memfasilitasi tanya jawab, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman kolektif mengenai pendidikan inklusif serta peran penyandang disabilitas dalam masyarakat (Aminah, et al., 2021). Peserta, yang terdiri dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, didorong untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan mereka. Sesi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan mengatasi kekhawatiran yang ada secara langsung. Terakhir, acara ditutup dengan sesi refleksi dan komitmen bersama, di mana seluruh peserta diajak untuk merumuskan langkah-langkah nyata yang akan mereka ambil untuk mendukung pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan yang melandasi kebijakan pendidikan inklusi, yang bertujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan di sekolah reguler sebagaimana anak pada umumnya (Andriyan, et al., 2023). Ini memastikan bahwa seminar tidak hanya menjadi acara satu kali, tetapi juga menjadi titik awal bagi tindakan nyata di masa depan.

Temuan dari program ini adalah masih banyaknya orang tua yang tidak menyekolahkan anak dengan penyandang disabilitas karena penolakan dari sekolah terdekat, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan guru untuk bagaimana mendidik anak dengan penyandang disabilitas. Temuan ini sejalan dengan swadesi et al., (2021) kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dan penerapannya di lapangan, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan. Padahal, pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah untuk penyediaan guru pendidikan khusus sebagai bentuk

tanggung jawab negara dalam terselenggaranya pendidikan inklusif. Terlebih lagi kesenjangan seperti ini diperparah oleh kurangnya pelatihan guru untuk mendidik anak dengan penyandang disabilitas.



Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah rangkaian seminar dan diskusi interaktif pada Gambar 3, kami berharap pemahaman masyarakat pesisir tentang hak dan peran penyandang disabilitas telah meningkat secara signifikan. Kami percaya bahwa perubahan nyata dimulai dari kesadaran dan kemauan untuk bertindak. Oleh karena itu, sebagai simbolisasi komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, acara ini ditutup dengan penyerahan alat bantu disabilitas kepada beberapa warga yang membutuhkan pada Gambar 4. Penyerahan ini bukan sekadar bantuan fisik, melainkan representasi dari semangat gotong royong dan kepedulian yang kini tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan proses esensial yang memungkinkan individu mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bagi anak-anak dengan disabilitas yang memerlukan pengawasan dan bantuan pendidikan yang sesuai kebutuhan (Pandia et al., 2023). Hal Ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara akademisi, komunitas, dan pemerintah dapat menghasilkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh penyandang disabilitas dan keluarga mereka, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan setara bagi semua.



Gambar 4. Penyerahan Alat Bantu Disabilitas

Selain kegiatan seminar, kunjungan rumah (*home visit*) menjadi pendekatan yang sangat efektif dan personal dalam program ini. Sesi ini dirancang untuk membangun hubungan yang lebih erat dan memberikan dukungan individual kepada orang tua dengan anak disabilitas. Dalam setiap kunjungan tim pengabdian tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif mendengarkan tantangan, kekhawatiran, dan harapan yang dirasakan oleh keluarga. Tim juga memberikan bimbingan praktis tentang cara-cara sederhana untuk mendukung pembelajaran anak di rumah, seperti menciptakan lingkungan yang kondusif dan menggunakan alat bantu sederhana. Hal ini sejalan dengan Munauwarah et al., (2021) tim secara khusus menyarankan strategi adaptif untuk pembelajaran di rumah, seperti penyesuaian materi dan metode didikan yang mempertimbangkan keunikan setiap anak. Kunjungan ini juga berfungsi sebagai sesi motivasi, di mana orang tua diingatkan tentang potensi besar yang dimiliki anak mereka. Melalui dialog yang empatik dan personal, tujuan utama dari sesi ini adalah untuk menumbuhkan kembali semangat dan kepercayaan diri orang tua, meyakinkan mereka bahwa mereka adalah pahlawan pertama dalam pendidikan anak-anak mereka.



Gambar 5. Kunjungan Rumah dan Intervensi

Setelah tahapan pelaksanaan seminar dan kunjungan rumah selesai pada Gambar 5, maka dilanjutkan dengan tahap evaluasi hasil yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2025. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan secara signifikan, beberapa diantaranya yaitu peningkatan wawasan pengetahuan hukum, pergeseran stigma sosial dan perubahan perilaku orang tua yang memiliki anak disabilitas. Peningkatan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat pesisir diukur secara kualitatif. Sebelum program, sebagian besar partisipan memiliki pemahaman yang minim atau bahkan tidak mengetahui tentang hak-hak penyandang disabilitas. Mereka sering kali tidak menyadari bahwa hak-hak disabilitas tersebut dilindungi oleh undang-undang, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Partisipan memahami beberapa pasal penting dan juga mulai mengaitkan hak-hak tersebut dengan kondisi nyata di lingkungan mereka. Perubahan pemahaman ini juga tercermin dalam diskusi kelompok terpumpun di mana partisipan mulai mengemukakan ide-ide tentang bagaimana hak-hak tersebut dapat diimplementasikan, seperti usulan untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas umum

dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah pesisir. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kesadaran meningkat terlihat dari perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya cenderung abai, menjadi lebih empati dan simpati terhadap penyandang disabilitas, hal ini mencerminkan bahwa metode partisipatif seperti PAR berguna dalam internalisasi hak-hak disabilitas serta memberdayakan masyarakat (Oden et al., 2010).

Program ini berhasil merubah perilaku orang tua penyandang disabilitas secara meningkat, terutama setelah mereka mengikuti seminar dan kunjungan rumah (*home visit*). Jika pada sebelumnya mereka cenderung pasif dan merasa malu, kini mereka menunjukkan inisiatif yang lebih besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa orang tua secara aktif mencari informasi tentang sekolah inklusif, kurikulum yang relevan, dan program pelatihan keterampilan yang dapat diikuti oleh anak-anak mereka. Dampak yang paling terlihat adalah peningkatan keberanian mereka untuk berbicara secara terbuka tentang disabilitas. Dengan demikian, kombinasi seminar yang memberikan pengetahuan dan kunjungan rumah yang memberikan dukungan individu serta berhasil menumbuhkan kepercayaan diri dan harapan orang tua, mengubah sikap tidak aktif menjadi tindakan aktif nyata demi masa depan anak. Hal ini serupa pada penelitian terdahulu yang mengatakan bahawa mereka mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, menyuarakan kebutuhan akan fasilitas yang lebih aksesibel, dan bahkan menjadi agen perubahan dalam mendorong kesadaran masyarakat pesisir tentang hak-hak disabilitas (Saputra et al., 2022). Peningkatan ini mencerminkan pengembangan literasi pada peserta dan perubahan cara pandang yang signifikan, menunjukkan potensi pendekatan intervensi dini yang mengintegrasikan prinsip-prinsip program sosial (Mahmic et al., 2021).

Kegiatan ini juga mengidentifikasi tantangan berkelanjutan yang harus diatasi. Analisis kualitatif dari diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan kepala sekolah beserta jajarannya menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki niat baik untuk mendukung pendidikan inklusif, ketersediaan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Keterbatasan guru dengan kompetensi di bidang pendidikan khusus, serta minimnya fasilitas pendukung di sekolah formal, menjadi kendala yang nyata. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan sikap masyarakat saja tidak cukup untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif secara penuh. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan institusi terkait menjadi sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai dan keberlanjutan program di masa depan. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya bahwa masih diperlukan peningkatan kredibilitas guru dan penyediaan fasilitas sarana prasarana yang adaptif di sekolah untuk memastikan penerapan pendidikan inklusif yang lebih baik (Fajri & Jauhari, 2024). Kemudian, beberapa program pelatihan guru yang relevan yang mencakup pedagogi diferensiasi dan strategi adaptif sangat krusial untuk mengatasi tantangan ini (Sharma et al., 2018).

4 KESIMPULAN

Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan seminar interaktif dan kunjungan rumah, program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Selain itu, terjadi pergeseran stigma sosial dan perubahan perilaku orang tua penyandang disabilitas, dari pasif menjadi lebih proaktif dalam mencari informasi dan menyekolahkan anak-anak mereka. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi yang terencana dan terarah mampu menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri orang tua, sehingga mereka menjadi agen perubahan dalam mendorong pendidikan inklusif di komunitas.

Meskipun program ini sukses meningkatkan kesadaran masyarakat, tantangan berkelanjutan masih ada, terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya untuk pendidikan inklusi. Oleh karena itu, kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan institusi terkait sangat disarankan. Hal ini penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai, seperti penyediaan guru dengan kompetensi khusus, fasilitas pendukung yang adaptif, dan program pelatihan yang relevan untuk guru. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, program ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya, demi terwujudnya masyarakat yang sepenuhnya inklusif dan setara bagi semua individu.

REFERENSI

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal model for fulfilling educational rights for persons with disabilities in the COVID-19 pandemic era. *KnE Social Sciences*, 317-325. DOI 10.18502/kss.v7i15.12101
- Aminah, N., Fauziah, F. R., Lathifah, S. G., Homdijah, O. S., & Fatin, J. (2021). Green Inclusive: Efforts to Create an Inclusive Environment Through Gardening Activities with Children with Special Needs. *Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, 21(1), 91-96. <https://doi.org/10.17509/jassi.v22i1.38904>
- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2022). Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94-106. <https://doi.org/10.26555/jptp.v5i2.25076>
- Astuti, D. S. (2020, February). Promoting Inclusive Education for Social Justice in Indonesia. In *2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)* (pp. 178-183). Atlantis Press. DOI 10.2991/assehr.k.200130.037
- Asmiati, N., Al Atsari, A., Anugrah, R. S., Az-Zahra, F. A., Ningtia, C., Izzati, A. N., ... & Salsabila, N. (2025). Edukasi Pendataan Disabilitas sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pemerataan Hak Warga Disabilitas di Desa Pasanggreh. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 260-267. <https://doi.org/10.55506/arch.v4i2.161>
- Aulia, S., & Noor, F. (2025). Sosialisasi dan Edukasi Hak Disabilitas melalui Program Mini Project Ramah Difabel di Desa Sidomulyo Kabupaten Sleman. *UNITY: Journal of Community Service*, 2(1), 16-20. <https://doi.org/10.70716/unity.v2i1.215>
- Fajri, B. R., & Jauhari, M. N. (2024). Challenges and Opportunities for Special-Needs Children in Elementary Schools. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(01), 1–8. <https://doi.org/10.37366/jpgsd.v5i01.4638>
- Faiq, M. F. A. (2022). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(3), 87–94.

- <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1329>
- Jayanti, S. D., & Marlina, T. (2018). Pelaksanaan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas (Studi kasus di Cirebon). *Hukum Responsif*, 9(2). <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i2.5051>
- Lestari, P., & Raodah, R. (2020). Accessibility of Persons with Disabilities in the Review of Disability Fiqh. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 1(2), 205-218. <https://doi.org/10.35878/santri.v1i2.242>
- Mahmic, S., Kern, M. L., & Janson, A. (2021). Identifying and shifting disempowering paradigms for families of children with disability through a system informed positive psychology approach. *Frontiers in psychology*, 12, 663640. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.663640>
- Munauwarah, R., Zahra, A., Supandi, M., Restiany, R. A., & Afrizal, D. (2021). Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas. *YASIN*, 1(1), 121-133. [article.php](#)
- Novyana, H., Simanjuntak, A. A., Dirkareshza, R., Akbar, S. S., Aryaputri, A. S., & Gumilar, E. R. (2024). PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI SLB NEGERI 02 JAKARTA MELALUI SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN INKLUSIF. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(4), 1174-1184. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v5i4.4231>
- Oden, K., Hernandez, B., & Hidalgo, M. (2010). Payoffs of participatory action research: Racial and ethnic minorities with disabilities reflect on their research experiences. *Community Development*, 41(1), 21-31. <https://doi.org/10.1080/15575330903477275>
- Pandia, W. S. S., Lee, S., & Khan, S. (2024). The fundamentals of Islamic religious education in inclusive schools meet special needs children's PAI issues. *Assyfa Journal of Islamic Studies*, 2(1), 77-86. <https://doi.org/10.61650/ajis.v2i1.322>
- Saputra, D., Assaf, R. A., & Achmad, A. Z. (2022). Enhancing community participation in public services through participatory innovation. *Scientific Journal of Public Administration*, 12(2), 677.
- Sharma, U., Armstrong, A. C., Merumeru, L., Simi, J., & Yared, H. (2019). Addressing barriers to implementing inclusive education in the Pacific. *International Journal of Inclusive Education*, 23(1), 65-78. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1514751>
- Swadesi, I. K. I., Kanca, I. N., & Wijaya, M. A. (2021, July). Analysis of problems and challenges in teaching sports, health and physical education to students with disabilities. In *5th Asian Education Symposium 2020 (AES 2020)* (pp. 270-273). Atlantis Press. DOI [10.2991/assehr.k.210715.057](https://doi.org/10.2991/assehr.k.210715.057)
- Widhyharto, D. S. (2018). Post-Installation: Insight of coastal-area society in Hybrid Electric Power Systems (HEPS) of Pantai Baru, Yogyakarta. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 42, p. 01002). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184201002>